

BAB IV

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PROGRAM KERJA MGP

Dalam bagian ini dipaparkan deskripsi data penelitian yang merupakan penjabaran dari aspek-aspek yang diungkap dalam pertanyaan penelitian, yakni: (1) perencanaan yang dilakukan pengelola MGP dalam merumuskan program kerja MGP, seperti; (a) dasar rujukan dalam merumuskan program kerja, (b) prosedur yang ditempuh dalam merumuskan program kerja, dan (c) pihak yang dilibatkan dalam merumuskan program kerja; (2) strategi implementasi program kerja MGP, seperti; (a) upaya yang dilakukan dalam meningkatkan profesional guru Pembimbing, (b) pihak yang dilibatkan dalam upaya meningkatkan profesional guru Pembimbing, dan (c) kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan profesional guru Pembimbing; (3) evaluasi yang dilakukan pengelola MGP terhadap implementasi program kerja MGP, seperti; (a) bentuk evaluasi yang digunakan, (b) tahapan evaluasi, dan (c) indikator keberhasilan dalam evaluasi program kerja.

Kemudian deskripsi mengenai data-data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan rujukan-rujukan konseptual, terutama yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru pembimbing dalam setting kegiatan *inservice training*, seperti halnya dalam kegiatan MGP.

Mengingat maksud dari penelitian ini adalah untuk merumuskan program kerja MGP untuk meningkatkan profesional guru Pembimbing di Bandung Timur, maka informasi atau data penelitian yang dianalisis digali dari fenomena yang ada dalam pengelolaan MGP di Bandung Timur.

Berikut disajikan paparan mengenai deskripsi data penelitian yang digali dari fenomena yang terjadi dalam pengelolaan MGP di Wilayah Bandung Timur.

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Perencanaan yang Dilakukan Pengelola MGP dalam Merumuskan Program Kerja MGP

a. Pertimbangan yang Dijadikan Rujukan dalam Merencanakan Program Kerja MGP

Dari telaah dokumentasi terhadap program kerja MGP Bandung Timur, belum ditemukan adanya rumusan visi dan misi MGP. Dikatakan oleh Ketua MGP, bahwa dalam merumuskan perencanaan program kerja MGP, pihaknya belum membuat rumusan visi dan misi. Diakui oleh sebagian besar pengelola MGP Bandung Timur, bahwa kegiatan MGP yang dilaksanakan selama ini belum memiliki visi dan misi yang jelas. Menurut pemahaman Ketua MGP, bahwa visi dan misi pada dasarnya diperlukan dalam merumuskan program kerja organisasi seperti MGP,

akan tetapi pihaknya sampai saat ini belum memiliki gambaran atau arah yang jelas, mau dibawa kemana kegiatan MGP tersebut.

Hasil wawancara dengan Ketua MGP, terungkap dua alasan belum dirumuskannya visi dan misi MGP Bandung Timur. *Pertama*, program kerja yang dilaksanakan dalam pengelolaan MGP di Bandung Timur selama ini lebih bersifat sebagai wahana untuk tukar pengalaman dan pemecahan masalah di antara sesama guru Pembimbing di SMU se wilayah Bandung Timur. Menurut pengakuan Ketua MGP, pihaknya belum memperoleh gambaran atau petunjuk yang jelas dari kepala sekolah, pengawas ataupun Dinas Pendidikan Kota Bandung tentang arah dan kebijakan dari MGP tersebut. Diakui pula oleh sebagian besar pengelola MGP Bandung Timur, bahwa meskipun keberadaan MGP tersebut legal, akan tetapi arahan dari instansi pendidikan terkait masih dirasakan kurang. *Kedua*, dilihat dari sisi materi kegiatan bahwa perencanaan program kerja yang dirumuskan cenderung merupakan penjabaran atau pembahasan dari ruang lingkup kegiatan guru Pembimbing di sekolah sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum nasional. Walaupun ada pembahasan, menurut para guru Pembimbing yang aktif dalam kegiatan MGP lebih sering membahas persoalan-persoalan teknis administratif. Yang dimaksud dengan persoalan teknis administratif adalah bahwa diskusi yang dilakukan membahas bagaimana cara membuat format program bimbingan konseling dalam setiap

semester untuk setiap kelas, bagaimana pula bentuk evaluasi, dan beberapa contoh kasus yang ditemui dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di masing-masing sekolah. Walaupun demikian, diakui oleh beberapa guru Pembimbing yang aktif dalam kegiatan (diskusi) MGP banyak memberikan manfaat, terutama dalam mengatasi kesulitan dan kebingungan untuk membuat format atau bentuk program kerja layanan bimbingan konseling di sekolah sampai dengan bentuk evaluasinya.

Dari telaah dokumentasi, ditemui ada beberapa dasar yuridis yang melandasi kegiatan MGP, termasuk di dalamnya kegiatan di MGP Bandung Timur. Di antara dasar yuridis dimaksud, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa “setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan suatu bangsa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, bab XIII pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara optimal;

3. SK Menpan Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 0433/P/1993 dan Nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Pedoman Bimbingan dan Konseling SLTP dan SMU;
7. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling SLTP dan SMU;
8. Petunjuk Teknis Pengelolaan Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) di SMU.

Dalam tataran operasional, dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam dokumen kegiatan MGP, belum dapat dipahami sepenuhnya oleh sebagian pengelola MGP. Bahkan hasil wawancara dengan Ketua MGP Bandung Timur, terungkap bahwa pihaknya masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang fungsi dan posisi MGP di era otonomi daerah. Namun demikian, kegiatan yang dilakukan MGP sampai saat memiliki fungsi strategis dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru Pembimbing. Bahkan diakui oleh guru-guru Pembimbing yang terlibat aktif dalam kegiatan MGP di Bandung Timur

bahwa dimasukkan upaya ke arah pengembangan kompetensi profesional Guru Pembimbing dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan guru Pembimbing dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada para siswa sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Dari telaah dokumentasi terhadap program kerja MGP Bandung Timur, nampak adanya bagian materi pembahasan dan diskusi dalam kegiatan MGP yang mencerminkan ke arah pengembangan kompetensi profesional guru Pembimbing, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3

**Program Pengayaan Materi Pembahasan dan Diskusi
MGP Bandung Timur Periode Tahun 2001-2002**

No	Pengayaan Materi Kegiatan	Nara Sumber	Keterangan
1	Pengenalan Permasalahan Narkoba	Kepala Sekolah	- Penyampaian materi
2	Pembahasan Layanan Bimbingan Konseling dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar	Guru Pembimbing SMU di Bandung Timur yang pernah melaksanakan layanan bimbingan dimaksud.	- pengayaan tersebut dilaksanakan secara integrasi dalam program kerja MGP.
3	Pendalaman dan pembahasan nilai-nilai universal agama dan budaya lokal dan nasional sebagai rujukan nilai dalam layanan bimbingan konseling di sekolah	Guru PAI, Guru Pembimbing, dan Kepala Sekolah	- Apabila dipandang perlu dan dana memungkinkan, mengundang nara sumber dari luar pengelola MGP setempat.

Kesadaran ke arah pengembangan kompetensi profesional guru Pembimbing di sekolah, menurut Ketua MGP diakui sebagai salah satu pertimbangan dalam merencanakan program kerja MGP, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kompetensi profesional guru Pembimbing. Dikatakan oleh Ketua MGP, bahwa tugas dan fungsi guru Pembimbing di sekolah saat ini dihadapkan pada beberapa persoalan dan sekaligus tantangan profesi. Persoalan dan tantangan dimaksud, seperti (1) fenomena tawuran yang melibatkan sebagian siswa SMU bahkan ada sebagian siswa SLTP; (2) adanya kasus sebagian siswa SMU yang terlibat dalam penggunaan dan pengedaran Narkoba dan minuman keras; (3) kasus-kasus pelecehan seksual dan perilaku seksual sebelum menikah sebagai dampak dari beredarnya film porno dan media massa lainnya; dan (4) era globalisasi dan arus informasi yang dalam sisi lainnya berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku pelajar, seperti perilaku agresif, individualistik, dan perilaku negatif lainnya. Persoalan dan tantangan tersebut, diupayakan untuk dibahas dalam pelaksanaan diskusi kegiatan MGP di Bandung Timur.

Salah satu wujud diakomodasinya persoalan-persoalan di atas dalam perencanaan program kerja MGP Bandung Timur dapat dipahami dengan disisipkannya materi pengayaan tentang pengenalan dan pencegahan bahaya Narkoba bagi para pelajar. Materi lainnya yang bersinggungan dengan persoalan yang dihadapi saat ini adalah adanya

pengayaan materi terhadap program bimbingan pribadi sosial yang memfokuskan pada upaya pencegahan terhadap budaya luar yang kurang sesuai dengan budaya Indonesia, seperti individualistik dan sekulerisme. Untuk memberikan pengayaan terhadap guru Pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pribadi sosial siswa, dilakukan pendalaman dan pengkajian nilai-nilai universal keagamaan dan budaya nasional serta lokal yang dapat dijadikan rujukan nilai dalam melaksanakan program bimbingan pribadi sosial kepada para siswa.

Munculnya isu-isu aktual dalam dunia pendidikan seperti peningkatan mutu pendidikan dan desentralisasi pendidikan merupakan perhatian lainnya yang berusaha dibahas dalam perencanaan program kerja MGP Bandung Timur. Adanya perhatian pengelola MGP Bandung Timur terhadap isu-isu aktual dalam dunia pendidikan tersebut, antara lain terwujud dengan adanya konsentrasi ke arah peningkatan kompetensi profesional Guru Pembimbing dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah. Menurut pemahaman guru Pembimbing yang terlibat aktif dalam kegiatan MGP di Bandung Timur, diakui bahwa adanya tuntutan ke arah peningkatan mutu pendidikan merupakan tantangan bagi guru Pembimbing di sekolah untuk meningkatkan fungsinya bersama dengan guru mata pelajaran. Dari pengamatan dalam kegiatan diskusi MGP, terungkap adanya kesadaran dari para guru Pembimbing untuk berupaya merubah citra dan persepsi siswa, guru

mata pelajaran dan orang tua siswa tentang keberadaan guru Pembimbing di sekolah sebagai guru spesialis menangani siswa yang bermasalah, seperti yang membolos, berkelahi, dan sejenisnya, tetapi berupaya membangun citra bahwa guru Pembimbing adalah sebagai mitra kerja guru mata pelajaran dalam mendorong prestasi belajar para siswa.

b. Prosedur yang Ditempuh dalam Merencanakan Program Kerja MGP

Hasil wawancara dengan Ketua MGP Bandung Timur terungkap bahwa ada beberapa prosedur yang ditempuh dalam merencanakan program kerja MGP, yakni: (1) mempelajari dan mendiskusikan dengan sesama pengelola MGP dan guru Pembimbing di Bandung Timur tentang kurikulum BK yang ditetapkan pemerintah secara nasional; (2) menginventarisir permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi guru Pembimbing di sekolah dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling; dan (3) merumuskan program kerja MGP yang merupakan penjabaran dari kurikulum BK nasional dan beberapa permasalahan aktual yang dihadapi guru Pembimbing di sekolah.

Dari hasil wawancara dengan para pengelola MGP dan guru Pembimbing di Bandung Timur penjabaran kurikulum BK merupakan kegiatan utama dalam merencanakan program kerja MGP di Bandung Timur. Dengan pola tersebut, diakui oleh para guru Pembimbing di Bandung Timur bahwa materi kegiatan MGP hampir sepenuhnya

membahas atau mendiskusikan penjabaran materi tentang kurikulum BK dalam kaitannya dengan layanan bimbingan konseling di sekolah. Materi kegiatan yang dirumuskan dalam program kerja MGP yang mengacu pada kurikulum BK antara lain; (1) program layanan orientasi dan informasi; (2) layanan bimbingan belajar; (3) layanan bimbingan pribadi sosial; dan (4) layanan bimbingan perencanaan karir.

Tentang materi kegiatan yang membahas tentang layanan orientasi dan informasi, ditujukan untuk memberikan pengenalan kepada siswa baru (kelas 1) tentang pola belajar di SMU. Dari telaah dokumentasi, beberapa materi kegiatan yang dirumuskan dalam program kerja MGP yang membahas layanan orientasi dan informasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Materi Kegiatan Layanan Orientasi dan Informasi
Di MGP Bandung Timur Periode Tahun 2001-2002

No	Materi Kegiatan	Nara Sumber	Keterangan
1	Cara Belajar di SMU	Team Guru Pembimbing dari SMUN 24 Bandung	- Sasaran Layanan Bimbingan Konseling ini ditujukan untuk siswa baru.
2	Kurikulum yang dipakai di SMU saat ini		
3	Sarana sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang belajar siswa		
4	Informasi pengembangan pribadi	Team Guru Pembimbing dari SMUN 8 Bandung	- Pelaksanaan layanan Bimbingan Konseling ini terintegrasi dengan Kegiatan Materi Orientasi Sekolah (MOS)
5	Informasi Kurikulum dan proses belajar mengajar		
6	Informasi Perguruan Tinggi		
7	Informasi jabatan		
8	Informasi kehidupan keluarga, sosial, masyarakat, keagamaan, sosial budaya, dan lingkungan		

Tentang materi layanan bimbingan belajar dimaksudkan sebagai layanan bimbingan klasikal yang diperuntukkan bagi semua siswa dari kelas satu sampai kelas tiga tentang cara-cara belajar yang efektif dan wawasan tentang syarat-syarat lingkungan sekolah yang kondusif sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Dari hasil pengamatan dalam acara diskusi MGP di Bandung Timur, terungkap bahwa beberapa tema yang dibahas dalam diskusi meliputi materi layanan bimbingan belajar, misalnya: membahas kasus-kasus siswa yang membolos, menurunnya prestasi belajar siswa, dan beberapa pola pembelajaran yang dapat meminimalisir rasa jenuh siswa dalam belajar.

Diakui oleh para guru Pembimbing, bahwa dirinya sering menerima keluhan dari siswa yang merasa takut dan tidak memiliki motivasi untuk belajar pada mata pelajaran tertentu seperti matematika, bahasa inggris dan IPA, khususnya kimia dan fisika. Menurut pemahaman para guru Pembimbing yang terlibat aktif dalam kegiatan MGP di Bandung Timur, bahwa munculnya permasalahan tersebut dapat dipandang dari dua kemungkinan, yaitu: Pertama, mungkin saja cara guru menyampaikan materi pelajaran yang kurang dapat dipahami oleh siswa. Kemungkinan kedua, adanya konsep dalam diri siswa tentang kesulitan-kesulitan yang dirasakan pada matapelajaran-matapelajaran di jurusan IPA

tersebut. Pemahaman seperti ini, dibahas dalam diskusi kegiatan MGP di Bandung Timur, khususnya dalam membahas materi yang berhubungan dengan layanan bimbingan belajar. Perencanaan program kerja yang membahas tentang layanan bimbingan belajar ini, menurut pemahaman sebagian besar guru Pembimbing yang mengikuti kegiatan MGP di Bandung Timur cukup menarik perhatian, mengingat upaya untuk meningkatkan mutu belajar siswa menjadi perhatian dari hampir semua kepala sekolah. Atas kondisi seperti ini, para guru Pembimbing merasa tertantang untuk ikut andil dalam mendorong terwujudnya proses belajar mengajar yang efektif pada siswa dan guru. Diakui juga oleh sebagian guru Pembimbing, bahwa kepala sekolah telah memberikan tugas khusus untuk memberikan layanan bimbingan belajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar secara optimal.

Dari telaah dokumentasi, ditemukan beberapa materi pembahasan dalam program kerja yang membahas tentang layanan bimbingan belajar di MGP Bandung Timur, sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Dalam merumuskan program kerja yang berhubungan dengan layanan bimbingan pribadi sosial, para pengelola MGP di Bandung Timur berupaya untuk merespon berbagai fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan, seperti tawuran, narkoba, penyimpangan perilaku seksual, dan perilaku kriminal siswa lainnya.

Tabel 5

**Materi Kegiatan Pembahasan Layanan Bimbingan Belajar
Di MGP Bandung Timur Periode Tahun 2001-2002**

No	Materi Kegiatan	Nara Sumber	Keterangan
1	Pentingnya sikap dan gaya mengajar guru pada umumnya dan guru Pembimbing	SMUN 16 Bandung dan SMU	- Untuk pendalaman pengalaman, dibahas diskusi rekan sejawat tentang pemahanan pola pembelajaran efektif bagi siswa SMU
2	Pola Belajar Siswa Efektif di SMU	Muhammadiyah Bandung	
3	Membahas Langkah-langkah Diagnostik Kesulitan Belajar		

Hasil wawancara dengan Ketua MGP Bandung Timur, terungkap bahwa perumusan program kerja yang berhubungan dengan layanan bimbingan pribadi sosial dimaksudkan sebagai upaya pengembangan pemahaman terhadap guru Pembimbing dalam melaksanakan fungsi pencegahan perilaku negatif pada siswa, dan sekaligus pengembangan pribadi siswa yang matang. Untuk memperkaya materi pembahasannya, digali pula beberapa nilai universal dalam agama dan budaya lokal dan nasional yang dijadikan sebagai rujukan nilai dalam mengembangkan kematangan pribadi siswa.

Dari telaah dokumentasi, terungkap beberapa materi kegiatan dalam perumusan program kerja MGP di Bandung Timur yang berkaitan dengan layanan bimbingan pribadi sosial, yakni sebagai berikut.

Tabel 6
Materi Kegiatan Pembahasan Layanan Bimbingan Pribadi Sosial
Di MGP Bandung Timur Periode Tahun 2001-2002

No	Materi Kegiatan	Nara Sumber	Keterangan
1	Pemahaman pribadi siswa, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki diri.	SMUN 10 Bandung dan Nara sumber di luar kepengurusan MGP Bandung Timur	Direncanakan untuk mengundang pihak akademisi dari Jurusan PPB UPI.
2	Pemahaman lingkungan hidup; keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat.		
3	Pengembangan kemampuan interpersonal siswa di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.		

Tentang program kerja MGP di Bandung Timur yang berhubungan dengan layanan bimbingan karir merupakan perencanaan program kerja lainnya yang sama-sama mendapat perhatian dari pengelola MGP setempat. Materi pembahasan yang direncanakan untuk dirumuskan dalam program layanan bimbingan karir ini merujuk pada ruang lingkup kurikulum nasional tentang bimbingan karir bagi siswa SMU. Menurut pengakuan Ketua MGP Bandung Timur, bahwa yang menjadi nara sumber dalam pembahasan layanan bimbingan karir ini, seperti biasanya adalah sesama guru Pembimbing SMU yang ada di wilayah Bandung Timur, dan apabila memungkinkan untuk menggunakan nara sumber dari kalangan akademisi UPI, khususnya jurusan PPB.

Tempat dan waktu dalam merumuskan perencanaan program kerja MGP Bandung Timur, dilaksanakan di sekretariat MGP Bandung Timur yakni di SMUN 10 Bandung yang beralamat di Jalan Cikutra No 77

Bandung. Menurut Ketua MGP Bandung Timur, bahwa di tempat inilah tahapan-tahapan perencanaan program kerja MGP dilaksanakan, mulai dari pengkajian dan pendalaman materi, perumusan program kerja dan penetapan atau pengesahan program kerja.

c. Pihak yang Dilibatkan dalam Merencanakan Program Kerja MGP

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua MGP dan pengelola MGP di Bandung Timur, terungkap bahwa pihak yang dilibatkan dalam merencanakan program kerja MGP adalah ketua dan seluruh pengurus serta anggota MGP di Bandung Timur. Dalam merumuskan perencanaan program kerja tersebut, terkadang diundang kepala sekolah dan pihak akademisi apabila hal tersebut dipandang perlu.

Peranan yang dilakukan Ketua MGP adalah mengkoordinir pelaksanaan perumusan perencanaan program kerja MGP. Di antara kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan program kerja MGP tersebut, seperti menyebarkan surat undangan kepada seluruh pengurus MGP dan anggota MGP di Bandung Timur, menyusun draft naskah yang akan dibahas dalam forum pertemuan, seperti rancangan rencana program kerja MGP, dan mengatur waktu pelaksanaannya atas dasar kesepakatan dengan pengurus MGP lainnya. Sementara yang dilakukan oleh pengurus MGP dan guru Pembimbing adalah menyusun konsep pembicaraan yang akan dibawa dalam forum perumusan rencana

program kerja MGP. Hasil wawancara dengan pengurus MGP dan guru Pembimbing, biasanya materi yang dibawa ke dalam forum perumusan rencana program kerja MGP, lebih banyak mengangkat persoalan-persoalan aktual yang dihadapi guru Pembimbing dalam melaksanakan tugas keseharian di sekolah.

Hasil wawancara dengan Ketua MGP dan pengurus MGP serta dengan guru Pembimbing yang terlibat dalam perumusan rencana program kerja, pada dasarnya tidak ada perbedaan hak di antara anggota perumus rencana program kerja MGP tersebut. Pada dasarnya guru Pembimbing memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pengurus MGP lainnya dalam menyampaikan saran atau ide yang perlu diakomodasi dalam rumusan rencana program kerja MGP. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Ketua MGP bahwa aktualisasi dan nilai strategis dari permasalahan yang dikemukakan peserta perumus program kerja MGP merupakan pertimbangan dalam diterima atau ditolaknya saran atau ide dalam perumusan program kerja MGP tersebut. Diakui pula oleh Ketua MGP, bahwa dengan prosedur seperti ini, partisipasi semua pengelola MGP dan guru Pembimbing merasa terwadahi dan terakomodasi dalam perumusan rencana program kerja MGP. Hal tersebut, sengaja dilakukan oleh Ketua MGP, karena program kerja MGP tersebut pada akhirnya akan diperuntukkan bagi guru Pembimbing sendiri, sehingga upaya untuk mengakomodasi dan melibatkan guru

Pembimbing dalam perumusan rencana program kerja MGP akan meningkatkan relevansi program kerja MGP dengan permasalahan aktual yang dihadapi guru Pembimbing di sekolah.

2. Strategi yang Dilaksanakan Pengelola MGP dalam Mengimplementasikan Program Kerja MGP

a. Bentuk Kegiatan dalam Meningkatkan Profesional Guru Pembimbing

Dari telaah dokumentasi, belum ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara internal organisasi mengatur pelaksanaan program kerja MGP. Hasil wawancara dengan Ketua MGP Bandung Timur, terungkap bahwa belum diketahui peraturan perundang-undangan yang menjadi payung atau dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan MGP yang dipimpinnya tersebut. Kalaupun ada pertemuan MGP tingkat Kota Bandung, jarang dibahas materi yang bersinggungan dengan dasar hukum dari keberadaan MGP tersebut.

Selama belum dipahaminya dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan MGP tersebut, para pengelola MGP di Bandung Timur berkeyakinan bahwa kegiatan MGP yang dilaksanakannya memiliki kontribusi ke arah peningkatan profesional guru Pembimbing di sekolah, paling tidak dapat berfungsi sebagai forum komunikasi antara sesama guru Pembimbing dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan layanan

bimbingan konseling di masing-masing sekolah. Dikatakan pula oleh Ketua MGP bahwa dalam meningkatkan profesional guru Pembimbing, pihaknya berupaya berpedoman kepada kode etik profesional selaku guru Pembimbing. Oleh karena itu, dalam materi pembinaan yang dilakukan kepada guru Pembimbing, dikemukakan prinsip-prinsip kerahasiaan (*confidential*), pertanggung jawaban moral dan profesi, dan pelaksanaan referal kasus atau klien apabila klien yang dihadapinya sudah berada di luar kemampuan profesional guru Pembimbing.

Menurut pengakuan guru Pembimbing yang aktif dalam kegiatan MGP di Bandung Timur, pengayaan konsep atau prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah saat menarik untuk dibahas, karena di dalamnya akan bersinggungan dengan permasalahan isu etis dan moral dalam konseling. Misalnya, pengakuan seorang guru Pembimbing dalam menangani kasus siswa yang telah berbuat asusila, apakah perlu diberitahukan kepada kedua orang tuanya sebagai pemberitahuan atau perlu ditutupi karena menyangkut harga diri siswa. Kasus-kasus seperti ini sering dijumpai oleh guru-guru Pembimbing di lapangan, sehingga dalam penanganannya memerlukan ketegasan sikap secara profesional.

Aspek lainnya yang disampaikan dalam pembinaan profesional guru Pembimbing dalam kegiatan MGP di Bandung Timur adalah pembahasan tentang pertanggung jawaban moral dan profesi seorang

guru Pembimbing dalam melaksanakan tugasnya. Dikatakan oleh Ketua MGP, bahwa peran figur guru Pembimbing di sekolah memegang peranan kunci dalam mengefektifkan berjalannya fungsi layanan bimbingan konseling di sekolah. Hasil wawancara dengan sebagian pengelola MGP dan guru Pembimbing yang aktif dalam kegiatan MGP di Bandung Timur, terungkap pemahaman bahwa perilaku moral guru Pembimbing merupakan syarat personal yang dapat menumbuhkan kepercayaan dari siswa dan rekan guru lainnya dalam membawa persoalan-persoalan pendidikan kepada guru Pembimbing. Tanpa adanya rasa kepercayaan (*trust*) dari siswa dan rekan sejawat, maka akan sulit untuk merubah paradigma guru Pembimbing dari sebagai guru pelengkap menjadi guru Pembimbing sebagai mitra kerja guru mata pelajaran dan konselor bagi para siswanya.

Dilihat dari sisi materi pengembangan profesional guru Pembimbing, berbagai upaya yang dilakukan pengelola MGP Bandung Timur ditujukan untuk memberikan pemahaman yang konkrit tentang tujuan dan ruang lingkup kurikulum BP yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ketua MGP, bahwa dalam memberikan pembinaan dan pengembangan profesional guru Pembimbing, pihaknya selalu berpijak pada kurikulum BP secara nasional. Pernyataan Ketua MGP tersebut, sejalan dengan hasil telaah dokumentasi bahwa ruang lingkup materi pengembangan profesional

guru Pembimbing yang dilakukan MGP di Bandung Timur pada dasarnya merupakan pengembangan dari empat jenis layanan bimbingan konseling di sekolah, yakni: layanan orientasi dan informasi, layanan bimbingan belajar, layanan bimbingan pribadi sosial, dan layanan bimbingan karir. Kalaupun ada pengayaan materi, bobotnya tidak sebanyak materi pokok yang tercantum dalam kurikulum BP.

Dilihat dari bentuk dan frekuensi kegiatan yang dilakukan pengelola MGP Bandung Timur, cukup dikatakan sudah berjalan secara terjadwal. Sebagai gambaran disajikan jadwal kegiatan MGP wilayah Bandung Timur Tahun 2001-2002 sebagaimana yang tertera dalam tabel 7.

Bentuk kegiatan yang dilakukan pengelola MGP Bandung Timur hanya memanfaatkan jadwal kegiatan yang telah disusun pengelola MGP. Bentuk kegiatan *inservice training* seperti seminar, lokakarya sangat jarang dilakukan oleh pengelola MGP Bandung Timur dalam mengembangkan profesionalisme guru Pembimbing. Kurang bervariasinya ragam kegiatan tersebut, diakui oleh ketua MGP disebabkan oleh minimnya dana operasional. Hal tersebut didukung dari data hasil telaah dokumentasi, di mana dalam operasionalnya banyak mengandalkan dari dana anggota, di mana setiap pertemuan satu orang anggota dipungut biaya sebesar Rp. 5.000,- dengan alokasi Rp. 3.000,- untuk konsumsi dan Rp. 2.000,- untuk Kas. Di samping itu juga terkadang ada dana bantuan dari pihak lain seperti yang diberikan oleh K3S sebesar Rp. 200.000,-.

Tabel 7
Jadwal Kegiatan MGP SMU
Wilayah Bandung Timur Tahun 2001-2002

No	Hari/Minggu ke	Materi	Penyaji	Metode
1	Selasa-Minggu Ke 3 (Apr 2001)	- Pembukaan Kegiatan MGP - Penjelasan jadwal teknik penyelenggaraan MGP	- Kepala SMUN 10 - Ketua/Wk Ketua	- Ceramah - Diskusi - Tanya jawab - Bermain peran - Simulasi - Problem Solving
2	Selasa-Minggu Ke 3 (Mei 2001)	- Layanan Orientasi	- Ketua/Wk Ketua	
3	Selasa-Minggu Ke 3 (Juni 2001)	- Layanan Informasi	- Ketua/Wk Ketua	
4	Selasa-Minggu Ke 3 (Juli 2001)	- Layanan Penempatan dan Penyaluran	- Ketua/Wk Ketua	
5	Selasa-Minggu Ke 3 (Agt 2001)	- Layanan Pembelajaran	- Ketua/Wk Ketua	
6	Selasa-Minggu Ke 3 (Sept 2001)	- Layanan Konseling Perorangan	- Ketua/Wk Ketua	
7	Selasa-Minggu Ke 3 (Okt 2001)	- Layanan Bimbingan Kelompok	- Ketua/Wk Ketua	
8	Selasa-Minggu Ke 3 (Nop 2001)	- Layanan Konseling Kelompok	- Ketua/Wk Ketua	
9	Selasa-Minggu Ke 3 (Des 2001)	- Bimbingan Pribadi Sosial	- Ketua/Wk Ketua	
10	Selasa-Minggu Ke 3 (Jan 2002)	- Bimbingan belajar	- Ketua/Wk Ketua	
11	Selasa-Minggu Ke 3 (Peb 2002)	- Bimbingan Karir	- Ketua/Wk Ketua	
12	Selasa-Minggu Ke 3 (Mar 2002)	- Aplikasi Instrumen BK	- Ketua/Wk Ketua	
13	Selasa-Minggu Ke 3 (Apr 2002)	- Penyelenggaraan himpunan data	- Ketua/Wk Ketua	
14	Selasa-Minggu Ke 3 (Mei 2002)	- Konferensi Kasus	- Ketua/Wk Ketua	
15	Selasa-Minggu Ke 3 (Juni 2002)	- Kunjungan rumah	- Ketua/Wk Ketua	
16	Selasa-Minggu Ke 3 (Juli 2002)	- Alih Tangan Kasus	- Ketua/Wk Ketua	

b. Pihak yang Dilibatkan Pengelola MGP dalam Upaya Meningkatkan Profesional Guru Pembimbing

Hasil wawancara dengan Ketua MGP Bandung Timur terungkap bahwa pihak yang dilibatkan pengelola MGP dalam mengembangkan profesional guru Pembimbing lebih banyak melibatkan sesama pengelola MGP dan guru-guru Pembimbing dari berbagai SMU di wilayah Bandung Timur. Kadang-kadang dalam melaksanakan kegiatan MGP, pengelola juga mendatangkan kalangan akademisi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB) Universitas Pendidikan Indonesia.

Diakui oleh Ketua MGP Bandung Timur, bahwa dengan melibatkan sesama pengelola MGP dan guru Pembimbing cukup membantu mengingat persoalan-persoalan yang dibahas dalam kegiatan MGP lebih banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan teknis di lapangan yang dihadapi oleh para guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah. Pertimbangan lain mengapa lebih banyak melibatkan sesama pengelola MGP dan guru Pembimbing adalah faktor keterbatasan dana atau anggaran yang dimiliki MGP Bandung Timur. Karena dana yang dimiliki pengelola MGP tidak memungkinkan untuk selalu mendatangkan pihak-pihak lain yang kompeten.



Hasil wawancara dengan Ketua MGP dan pengelola MGP lainnya

serta data hasil telaah dokumentasi, terungkap bahwa dalam upaya mengembangkan profesional guru Pembimbing, pihak MGP Bandung Timur pernah juga melibatkan kalangan akademisi dari Perguruan Tinggi. Upaya untuk mendatangkan pihak akademisi, terutama dimaksudkan untuk memberikan pengayaan pengetahuan dan pemahaman guru Pembimbing tentang prinsip-prinsip layanan bimbingan konseling secara teoretis.

c. Kendala yang Dihadapi Pengelola MGP dalam Mengembangkan Profesional Guru Pembimbing

Hasil wawancara dengan Ketua MGP dan pengelola MGP Bandung Timur bahwa dalam upaya mengembangkan profesionalisme guru Pembimbing, pihaknya dihadapkan pada kendala. Dilihat dari sisi internal Sumber Daya Manusia, yaitu pengetahuan dan pemahaman guru Pembimbing terhadap layanan bimbingan konseling yang cenderung terbatas pada tugas yang biasa dilaksanakan, dan kurang memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya inovasi dalam layanan bimbingan konseling. Hal tersebut didukung oleh pernyataan guru Pembimbing yang aktif dalam kegiatan MGP di Bandung Timur, bahwa kesibukan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis administratif selaku guru Pembimbing, dirinya kurang memiliki waktu dan pikiran untuk

menghasilkan karya-karya inovatif dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling.

Keterbatasan anggaran atau dana yang dimiliki oleh pengurus MGP Bandung Timur merupakan kendala lainnya yang menghambat upaya pengembangan profesionalisme guru Pembimbing. Dengan anggaran seadanya, diakui oleh Ketua MGP Bandung Timur pihaknya mengalami kesulitan untuk mengembangkan berbagai program pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru Pembimbing secara bervariasi. Dengan demikian, materi pembahasan dalam upaya mengembangkan profesionalisme guru Pembimbing tersebut lebih banyak menyajikan persoalan-persoalan teknik administratif guru Pembimbing dalam tugas keseharian, dan jarang menyajikan konsep dan prinsip-prinsip aktual yang berkembang dalam bidang bimbingan konseling saat ini.

Dari hasil observasi terhadap kegiatan di MGP Bandung Timur, ditemukan adanya kecenderungan bahwa yang banyak mengambil inisiatif dalam kegiatan MGP terbatas pada ketua dan sekretaris. Meskipun pengelola yang lain datang (hadir) dalam kegiatan, akan tetapi perannya lebih banyak mengikuti perintah atau program kerja yang diinstruksikan oleh ketua dan atau sekretaris MGP. Temuan ini sejalan dari hasil telaah dokumentasi dimana dalam kepengurusan MGP di Bandung Timur belum dirumuskan uraian tugas pokok dan fungsi kepengurusan MGP, sehingga keberadaan pengelola yang lainnya lebih

banyak menunggu instruksi dari ketua MGP. Kondisi ini menyebabkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki MGP di Bandung Timur belum termanfaatkan secara maksimal, karena belum adanya arahan tugas yang jelas.

3. Evaluasi yang Dilakukan Pengelola MGP terhadap Program Kerja yang Telah Dilaksanakan

a. Bentuk Evaluasi yang Dilaksanakan

Dari telaah dokumentasi dan wawancara dengan pengelola MGP di Bandung Timur, terungkap bahwa bentuk evaluasi yang digunakan dalam menilai keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan umumnya sering dilaksanakan dalam bentuk pembahasan tentang berbagai persoalan yang dihadapi guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di masing-masing sekolah. Pengelola MGP mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan di sekolah untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan program kerja MGP berikutnya. Beberapa persoalan yang teridentifikasi, yaitu: kepuasan anggota MGP terhadap materi diskusi yang dilaksanakan, frekuensi dan bentuk pelaksanaan, pedoman supervisi, dan catatan diskusi dalam tiap pertemuan. Hasil wawancara dengan Ketua MGP Bandung Timur, terungkap bahwa alat evaluasi yang digunakan selama ini masih terbatas pada catatan kasus yang dihadapi guru Pembimbing

dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling pada masing-masing sekolah. Catatan kasus tersebut digunakan melalui forum pembahasan atau evaluasi program kerja guru Pembimbing pada masing-masing sekolah.

Pelaksanaan evaluasi terhadap program kerja MGP yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan, meskipun sampai saat ini masih terbatas pada evaluasi dalam bentuk inventarisasi masalah yang dihadapi guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan di sekolah melalui forum diskusi.

b. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Program Kerja MGP

Evaluasi yang dilaksanakan oleh pengelola MGP di Bandung Timur dilakukan dalam bentuk yang sederhana dan praktis. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua MGP, bahwa evaluasi yang dilaksanakan selama ini hanya berpatokan pada jadwal kegiatan MGP dalam setiap tahunnya, di mana evaluasi dilaksanakan dalam proses dan di akhir kegiatan. Kalaupun ada perencanaan dalam tahapan pelaksanaan evaluasi, dilakukan untuk menentukan kapan pelaksanaan evaluasi tetapi tidak pada perumusan kisi-kisi evaluasi (instrumen) yang akan digunakan.

Apa yang dikemukakan oleh Ketua MGP tentang tahapan kegiatan evaluasi tersebut, sejalan dengan telaah dokumentasi yang menunjukkan indikator bahwa kepengurusan MGP di Bandung Timur belum memiliki

dokumentasi tentang kisi-kisi pelaksanaan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan selama ini cenderung terbatas pada pengungkapan masalah yang dihadapi oleh guru Pembimbing di sekolah melalui forum diskusi dan tanya jawab. Dalam forum ini, pengelola MGP menginventarisir berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru Pembimbing di sekolah, untuk untuk merumuskan program kerja MGP berikutnya.

c. Indikator Keberhasilan Program Kerja MGP

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas, yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program kerja MGP menekankan pada dua pertimbangan, yaitu: kelancaran dalam proses implementasi dan dampak yang dimunculkan dari pelaksanaan program kerja MGP terhadap peningkatan profesional guru Pembimbing.

Hasil wawancara dengan Ketua MGP Bandung Timur, terungkap bahwa untuk ukuran internal anggota MGP Bandung Timur pelaksanaan program kerja dapat dikatakan berjalan lancar. Yang menjadi indikator berjalan lancar pelaksanaan program kerja MGP tersebut, menurut pemahaman pengelola MGP Bandung Timur adalah berjalannya program kerja MGP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni setiap hari Selasa minggu ke tiga dalam setiap bulan.

Sementara dilihat dari sisi dampak (output) keberhasilan program kerja MGP di Bandung Timur diakui oleh Ketua MGP belum memberikan

hasil yang maksimal. Kondisi ini diakui oleh Ketua MGP mengingat porsi kegiatan dalam diskusi MGP lebih banyak membahas persoalan-persoalan teknis administratif sesuai dengan kurikulum BK yang berlaku dan kurang membahas persoalan-persoalan yang membahas inovasi layanan bimbingan konseling dalam setting persekolahan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana dijelaskan dalam bab satu, bahwa tujuan akhir dari penelitian ini adalah berupaya untuk merumuskan program kerja MGP dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru Pembimbing di Bandung Timur. Yang dimaksud dengan perumusan program kerja MGP dalam penelitian ini digali dari analisis empiris tentang kondisi yang ditemukan dalam pengelolaan MGP di Bandung Timur dan analisis konseptual tentang kerangka perumusan program kerja bimbingan konseling.

Untuk menganalisis kondisi yang berlangsung dalam pengelolaan MGP di Bandung Timur tersebut, didekati dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil dari analisis SWOT tersebut, kemudian akan dirumuskan program kerja MGP dimaksud. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan memfokuskan pada analisis SWOT terhadap kondisi empiris pengelolaan MGP di Bandung Timur.

1. Analisis SWOT tentang Kondisi Empiris Pengelolaan MGP di Bandung Timur

Secara konseptual SWOT merupakan akronim dari analisis internal Strengths dan Weaknesses, serta analisis eksternal Opportunities dan Threats yang dapat digunakan untuk membuat pemetaan terhadap kondisi atau profil dunia bisnis atau suatu organisasi.

S. B. Lubis menjelaskan batasan konseptual analisis SWOT sebagai berikut:

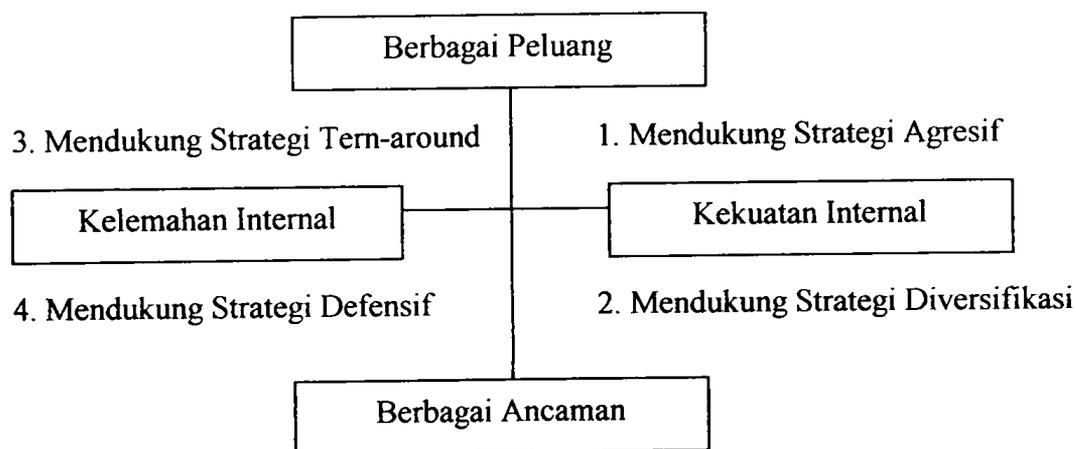
Strengths (kekuatan) merupakan sumberdaya atau kemampuan organisasi yang secara efektif dapat digunakan untuk mencapai tujuan (relatif lebih bagus dibanding organisasi lainnya). Dan *Weaknesses* (kelemahan) merupakan keterbatasan dan permasalahan yang ada dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan (kondisi yang lebih buruk dibanding organisasi sejenis). Sedangkan *Opportunities* (peluang) merupakan peristiwa atau kecenderungan eksternal yang berdampak positif terhadap organisasi (situasi eksternal yang menguntungkan bagi organisasi). Dan *Threats* (ancaman) merupakan peristiwa atau kecenderungan eksternal yang berdampak negatif terhadap organisasi, situasi eksternal yang tidak menguntungkan bahkan mengancam organisasi).

Merujuk pada batasan konseptual di atas, pendekatan analisis SWOT tersebut dapat membantu untuk memahami kondisi aktual-kontekstual secara komprehensif. Sejalan dengan hal tersebut, F. Rangkuti (2000: 19), menyatakan bahwa:

Analisis SWOT adalah alat formulasi dalam menganalisis situasi dari suatu organisasi, untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dan merumuskan strategi suatu perusahaan, yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Atau

dengan kata lain, membandingkan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Pengumpulan informasi tentang kejadian pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi, dapat dijadikan berbagai isu strategis yang akan digunakan manajemen untuk menentukan arah yang hendak ditempuh. Perbandingan faktor eksternal dan faktor internal, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4

Analisis SWOT Model F. Rangkuti (2000: 19)

Aplikasi analisis SWOT dalam prakteknya dapat berfungsi sebagai sebuah strategi operasional dalam memetakan kondisi obyektif sebuah organisasi. Hal tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh F. Rangkuti (2000: 183), bahwa:

Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan atau suatu organisasi akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam mengidentifikasi suatu metode atau strategi untuk menganalisis proses situasi (analisis SWOT) dalam suatu organisasi atau sekolah, perlu adanya

manajemen strategi yang meliputi persiapan, analisis situasi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Dalam pendapat lainnya, Lubis (1999: 32), mengemukakan bahwa:

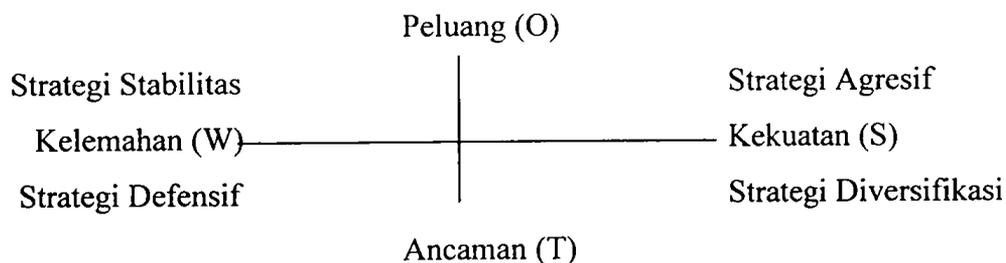
Strategi adalah kerangka atau rencana yang menginteraksikan tujuan (pernyataan tentang apa yang diinginkan, berbagai aktivitas *step by step sequence of action*). Strategi mengandung sasaran dan rute untuk mencapai sasaran, strategi dilakukan dengan mencari kesesuaian paling menguntungkan di antara tiga kekuatan, yaitu kondisi masa kini, bagaimana cara untuk mencapai dan seperti apa kondisi masa depan (kelemahan dalam ancaman) menjadi kesempatan dan peluang, misi dan sasaran.

Dengan demikian perlu adanya manajemen strategi yaitu proses interaktif yang kontinu untuk menyelaraskan organisasi secara keseluruhan terhadap lingkungan yang terdiri atas rangkaian tindakan strategis. Fred Dave dan Roman L.W (1941: 631), mengemukakan bahwa *"Strategie management is that set of managerial decision, and actions that determine long run performance of corporation if includes strategies formulation, strategie implementation, and evaluation"*. Artinya, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang menentukan keberhasilan perusahaan/lembaga dalam jangka panjang, yang terdiri dari perumusan strategi implementasi dan evaluasi strategi.

Dengan demikian, strategi dan manajemen strategi merupakan proses situasi organisasi yang menggunakan fungsi-fungsi manajemen, untuk menyelesaikan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan melalui serangkaian kegiatan yang saling terkait. Untuk mengidentifikasi, menganalisis proses pengelolaan kegiatan suatu organisasi yang dalam

hal ini adalah MGP Bandung Timur, sangatlah diperlukan untuk menciptakan manajemen implementasi program kerja MGP yang dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan profesional guru Pembimbing.

Dadi Permadi (2000: 19), menjelaskan strategi analisis SWOT:



Gambar 5
Strategi Analisis SWOT

Pada strategi agresif (SO), suatu lembaga sekolah merupakan strategi yang sangat menguntungkan, sehingga dapat memanfaatkan pertumbuhan, dan agresif dapat menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Pada strategi diversifikasi walaupun suatu organisasi menghadapi berbagai ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal, memanfaatkan peluang jangka panjang dan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Apabila suatu organisasi situasinya tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, maka strategi diversif harus dapat menciptakan strategi yang dapat meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman. Sedangkan strategi stabilitas,

memiliki peluang yang sangat besar, tetapi menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi ini menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang lebih baik.

Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*), dibuat untuk menggunakan kekuatan internal organisasi agar dapat mengambil manfaat dari kesempatan eksternal. Strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*) dirancang dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan agar mampu mengambil manfaat dari peluang yang tersedia di lingkungan eksternal; ini sangat perlu walaupun organisasi memiliki kelemahan internal yang dapat menghambat eksploitasi peluang tersebut. Strategi S-T (*Strengths-Threats*) dibuat atas dasar kekuatan organisasi untuk menghindari pengaruh ancaman eksternal. Strategi W-T (*Weaknesses-Threats*) merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal agar dapat menghindari ancaman eksternal dan kelemahan internal berada pada posisi yang sulit.

Selanjutnya, hasil telaah data penelitian di atas akan dianalisis melalui analisis SWOT dalam uraian berikut ini.

2. Analisis SWOT tentang Perencanaan Program Kerja MGP di Bandung Timur

a. Kekuatan

Kekuatan yang ada dalam perencanaan program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Dalam perumusan program kerja melibatkan pengelola MGP, guru Pembimbing dan instansi terkait seperti Pengawas dan Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai penasihat.
- 2) Lingkup materi yang dirumuskan dalam program kerja, berupaya mengakomodir permasalahan atau kasus-kasus aktual yang dihadapi siswa di sekolah, seperti tawuran, narkoba, dan penyimpangan perilaku lainnya.

b. Kelemahan

Kelemahan yang ada dalam perencanaan program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Belum dimilikinya visi dan misi organisasi sebagai pijakan dalam merumuskan perencanaan program kerja MGP.
- 2) Lingkup materi kegiatan yang direncanakan dalam program kerja MGP belum memasukkan temuan-temuan baru di bidang layanan bimbingan konseling yang dikemukakan oleh kalangan akademisi.
- 3) Belum terakomodirnya isu-isu aktual di bidang kebijakan pengelolaan pendidikan, seperti halnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi, dan *life skills*.

c. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan program kerja MGP, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Kesiapan kalangan akademisi dalam membantu merumuskan perencanaan program kerja MGP yang sesuai dengan kebutuhan guru Pembimbing di lapangan dan perkembangan BP dalam tataran konseptual.
- 2) Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, yang memberikan peluang kepada sekolah untuk manajemen program kerja sekolah secara otonomi dan profesional. Kondisi ini setidaknya akan memberikan implikasi terhadap fleksibilitas guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah secara otonomi dan profesional.

d. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam perencanaan program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Munculnya berbagai fenomena degradasi moral pada sebagian siswa, seperti tawuran, narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya.
- 2) Orientasi pembangunan pendidikan dewasa ini yang menekankan pada pencapaian mutu pendidikan, mengisyaratkan bahwa peran dan fungsi guru Pembimbing perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan tersebut.

3. Analisis SWOT tentang Implementasi Program Kerja MGP di Bandung Timur

a. Kekuatan

Kekuatan yang ada dalam implementasi program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Jumlah dan potensi sumber daya manusia (guru Pembimbing) dan pengelola MGP yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai guru Pembimbing.
- 2) Semangat, motivasi, dan minat sebagian besar guru Pembimbing untuk mengembangkan kompetensi profesional dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah. Gambaran ini ditandai dengan berjalannya kegiatan MGP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

b. Kelemahan

Kelemahan yang ada dalam implementasi program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Belum bervariasinya jenis dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola MGP dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional guru Pembimbing. Gambaran ini, ditandai dengan jenis kegiatan yang dilakukan lebih banyak dalam bentuk pembahasan kasus keseharian yang dihadapi guru Pembimbing di sekolah, dan jarang membahas inovasi di bidang BP.

- 2) Masih terbatasnya jaringan kerja sama kemitraan antara pengelola MGP dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan kalangan akademisi, instansi pemerintahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.

c. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang memberikan peluang kepada sekolah untuk melaksanakan program kerja sekolah secara mandiri dan kreatif tanpa diatur ketat oleh petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah.
- 2) Dimilikinya kewenangan pada pihak sekolah untuk menggali pembiayaan pendidikan melalui kerja sama kemitraan dengan Dewan Sekolah, memberikan peluang bagi pengelola MGP untuk mengembangkan variasi implementasi program kerja.

d. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Kompleksitas permasalahan yang dihadapi siswa yang pada akhirnya berimplikasi terhadap peran dan fungsi guru Pembimbing di sekolah.

- 2) Menurunnya kepercayaan sebagian besar masyarakat terhadap dunia pendidikan, merupakan tantangan bagi guru Pembimbing untuk mendorong prestasi belajar siswa dan prestasi sekolah.

4. Analisis SWOT tentang Evaluasi Program Kerja MGP di Bandung Timur

a. Kekuatan

Kekuatan yang ada dalam evaluasi program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Antusiasme guru Pembimbing dalam menyampaikan permasalahan (kesulitan) yang dihadapi dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah. Kondisi ini akan memudahkan bagi pengelola MGP dalam mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi guru Pembimbing yang pada akhirnya dapat dianalisis tingkat kontribusi yang diberikan MGP dalam mengembangkan kompetensi profesional guru Pembimbing.
- 2) Pengalaman pengelola MGP di bidang layanan bimbingan konseling, sehingga permasalahan yang dimunculkan dalam evaluasi (melalui diskusi), dapat dengan mudah dikenali letak permasalahannya.

b. Kelemahan

Kelemahan yang ada dalam evaluasi program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Bentuk evaluasi masih terbatas pada pembahasan permasalahan yang dihadapi guru Pembimbing melalui forum diskusi, belum dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi, misalnya dalam bentuk angket dan pedoman supervisi.
- 2) Belum adanya program tindak lanjut dari hasil evaluasi program kerja.

c. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam evaluasi program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Jumlah dan potensi guru Pembimbing dan pengelola MGP yang memiliki pengalaman kerja di bidang layanan bimbingan konseling, sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi program kerja MGP.
- 2) Kesiediaan kalangan akademisi untuk membantu pengelola MGP dalam upaya mengoptimalkan program kerja MGP sebagai salah satu wadah pembinaan kompetensi profesional guru Pembimbing.

d. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam evaluasi program kerja MGP di Bandung Timur, diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Kompleksitas permasalahan yang dihadapi guru Pembimbing di sekolah, sehingga evaluasi program kerja MGP harus dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif.

- 2) Menurunnya kepercayaan sebagian besar masyarakat terhadap dunia pendidikan, sehingga evaluasi program kerja MGP harus menggali peran dan posisi guru Pembimbing yang ideal dan feasible.

Merujuk pada pendapat Rochman Natawidjaja (2002) tentang deskripsi SWOT di atas, berikut disajikan matrik analisis SWOT terhadap pengelolaan MGP di Bandung Timur sebagaimana tertera dalam gambar 6.

Dari analisis SWOT pada gambar 6, dapat dipahami beberapa persoalan internal yang dihadapi dalam pengelolaan MGP di Wilayah Bandung Timur, antara lain: (1) belum dimilikinya visi dan misi MGP; (2) belum dimilikinya rumusan program kerja MGP yang mampu mendorong ke arah pengembangan profesionalisme guru Pembimbing; (3) minimnya dana operasional kegiatan MGP; dan (4) belum dipahaminya peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan MGP. Sementara persoalan eksternal yang dihadapi dalam pengelolaan MGP di Wilayah Bandung Timur, antara lain: (1) upaya pembinaan guru Pembimbing yang dilakukan dihadapkan pada ancaman dampak era globalisasi dan arus informasi terhadap penyimpangan perilaku siswa; dan (2) reposisi peran guru Pembimbing di sekolah dalam era desentralisasi pendidikan.

Gambar 6
Matrik Analisis SWOT Pengelolaan MGP di Bandung Timur

INTERNAL	<u>KEKUATAN</u>	<u>KELEMAHAN</u>
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimilikinya motivasi dan minat guru Pembimbing dalam mengikuti kegiatan MGP. 2. MGP Bandung Timur termasuk ke dalam MGP Percontohan di Kota Bandung. 3. Adanya keterkaitan antara bidang kerja MGP dengan latar belakang pendidikan Pengelola MGP dan atau Guru Pembimbing. 4. Berjalannya kegiatan MGP sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya rumusan visi dan misi MGP. 2. Minimnya dana operasional kegiatan MGP. 3. Belum dipahaminya peraturan perundang-undangan tentang MGP oleh pengelola MGP. 4. Belum dirumuskannya program kerja MGP, namun baru jadwal kegiatan MGP.
<u>PELUANG</u>	<u>STRATEGI ALTERNATIF</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya para pakar BP di kalangan akademisi/PT. 2. Jumlah Guru Pembimbing di SMU yang cukup banyak. 3. Desentralisasi pendidikan yang memberikan peluang ke arah otonomi profesional guru, termasuk guru Pembimbing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pembenahan MGP</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan visi dan misi MGP b. Pengembangan kerja sama kemitraan, seperti dengan Perguruan Tinggi, instansi pemerintah terkait, dan LSM di bidang pendidikan. c. Menggali dana kegiatan MGP dari alokasi dana Pemda Kota Bandung. 2. <i>Perumusan Program Kerja</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan visi dan misi organisasi MGP b. Peran dan tugas guru Pembimbing dalam paradigma desentralisasi pendidikan c. Peran dan tugas guru Pembimbing dalam meningkatkan mutu pendidikan (prestasi murid). d. Kerja sama kemitraan MGP dengan kalangan akademisi (PT) 3. <i>Prosedur Implementasi Program Kerja</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukan uji lapangan, mengingat program yang dirumuskan masih tentatif (hipotetis). b. Program yang dirumuskan diimplementasikan secara integral dengan program kerja MGP yang telah ada. 	
<u>ANCAMAN</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi dan arus informasi terhadap perilaku siswa. 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. 		

Manakala dipandang dari sisi guru Pembimbing, munculnya permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya upaya pengembangan profesional guru Pembimbing di sekolah. Sebenarnya upaya pengembangan profesional guru Pembimbing di sekolah merupakan solusi atas beberapa persoalan atau tantangan yang dihadapi guru Pembimbing saat ini. Supriadi, (1997: 12), mengidentifikasi beberapa persoalan yang dihadapi guru Pembimbing di sekolah, yaitu:

apresiasi siswa dan guru terhadap profesi BP, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, tidak sebandingnya jumlah pembimbing dengan jumlah siswa, kurangnya kemampuan dan komitmen petugas BP dalam menjalankan tugasnya, dan kesenjangan antara apa yang dipelajari di LPTK dengan apa yang dibutuhkan di lapangan.

Menyadari akan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh guru Pembimbing sebagaimana dijelaskan di atas, upaya untuk memaksimalkan peranan MGP dapat dipandang sebagai solusi strategis dalam meningkatkan profesional guru Pembimbing. Makna profesional guru Pembimbing mengandung makna bahwa guru Pembimbing yang melaksanakan tugas atau layanan bimbingan konseling di sekolah-sekolah dapat menunjukkan kriteria kompetensi secara profesional. Kemampuan guru Pembimbing di sekolah seharusnya diabdikan untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, guru Pembimbing senantiasa harus berpegang kepada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan profesinya. Hal ini berarti bahwa konselor harus sedapat mungkin

memanfaatkan dan mengindahkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungannya dengan asumsi bahwa konseling meskipun settingnya mikro, selalu ada dalam suatu konteks. Dengan kata lain perilaku profesi konselor (guru Pembimbing) tidak berlangsung dalam kevakuman. Atas asumsi seperti ini, maka keberadaan MGP memegang peranan sebagai wahana bagi para guru Pembimbing untuk mengembangkan profesionalnya di bidang layanan bimbingan konseling di sekolah.

C. Program Kerja MGP untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pembimbing SMU di Bandung Timur

Berangkat dari analisis SWOT tentang kondisi pengelolaan MGP di Bandung Timur, maka upaya untuk merumuskan program kerja MGP di Bandung Timur ini merupakan solusi dan sekaligus produk penelitian yang direkomendasikan sebagai upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru Pembimbing di sekolah. Pola perumusan program kerja MGP dalam penelitian ini didasarkan atas analisis empiris dan tinjauan konseptual dan belum melalui uji lapangan. Dengan demikian, program kerja MGP yang direkomendasikan dalam penelitian ini masih bersifat tentatif atau hipotetis, sehingga belum teruji keandalannya secara empiris.

Dengan demikian, program kerja MGP yang dirumuskan belum sepenuhnya menggambarkan tahapan perumusan program kerja yang ideal. Sebagai bahan komparasi tentang program kerja MGP yang ideal,

salah satunya dapat merujuk pada pendapat Herman J. Peters dan Bruce Shertzer (1974: 111-113), bahwa program kerja harus dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Merumuskan perencanaan program kerja (*planning*);
2. Membuat keputusan (*decision making*);
3. Koordinasi (*coordination*);
4. Mengarahkan (*directing*);
5. Mengembangkan (*developing*);
6. Evaluasi (*evaluating*);
7. Perencanaan untuk tahap berikutnya (*planning future steps*).

Merujuk pada batasan konseptual di atas, maka program kerja MGP yang dirumuskan dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama bahwa program kerja yang dirumuskan belum melalui uji lapangan, sehingga tahap pengembangan, evaluasi, dan perencanaan untuk tahap berikutnya (*planning future steps*) belum dapat dilaksanakan.

Program kerja MGP yang telah dirumuskan dijelaskan dalam uraian berikut.

a. Rasional

Upaya untuk meningkatkan profesional guru Pembimbing merupakan kebutuhan dan sekaligus keharusan dalam upaya menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan dewasa ini. Berbagai fenomena yang berlangsung dalam dunia pendidikan dan kebijakan aktual pendidikan dewasa ini mengharuskan adanya upaya reposisi peran dan tugas guru Pembimbing di sekolah dari

yang semula terkesan sebagai guru pelengkap menjadi mitra kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, diperlukan adanya upaya profesionalisasi guru Pembimbing secara berkelanjutan dan dilaksanakan dalam beragam setting pembinaan. Dalam konteks seperti ini, peran yang dilaksanakan MGP memegang peranan strategis dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional guru Pembimbing, tanpa harus banyak menyita waktu melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah. Dengan demikian, pengembangan program kerja MGP memiliki alasan yang rasional dalam upaya mengoptimalkan kegiatan MGP sebagai forum komunikasi guru Pembimbing dalam upaya meningkatkan profesionalisme layanan bimbingan konseling di sekolah.

Permasalahan yang terungkap dari hasil penelitian ini adalah: (1) terbatasnya anggaran atau dana operasional kegiatan MGP; (2) belum dimilikinya rumusan visi dan misi organisasi; (3) belum terakomodasinya isu-isu aktual dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan seperti desentralisasi pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah; dan (4) masih jaranganya pengelola MGP melibatkan atau mendatangkan pakar BK sebagai nara sumber dalam kegiatan MGP. Dari permasalahan yang ditemukan tersebut, ada beberapa persoalan yang dapat diatasi dengan mengoptimalkan program kerja, yakni: perumusan visi dan misi organisasi, penjabaran isu dan kebijakan aktual di bidang pendidikan,

dan pengembangan kerja sama kemitraan dengan kalangan akademisi untuk memperkaya wawasan pengetahuan dan keterampilan guru Pembimbing.

Program kerja MGP yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan solusi ke arah optimalisasi peran MGP dalam meningkatkan profesional guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah sesuai dengan tuntutan jaman.

b. Visi dan Misi

Program kerja MGP Bandung Timur yang dirumuskan memiliki visi ke arah peningkatan kompetensi profesional guru Pembimbing. Dari rumusan visi program kerja MGP dimaksud, mengandung makna bahwa melalui program kerja yang dirumuskan menghendaki adanya optimalisasi peran dan fungsi MGP sebagai wadah pembinaan kompetensi profesional dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan.

Adapun yang menjadi misi dari program kerja MGP Bandung Timur, dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Menambah pengetahuan Guru Pembimbing
- 2) Meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan kegiatan BK
- 3) Membina kepribadian yang mandiri Guru Pembimbing
- 4) Menjunjung tinggi kode etik Bimbingan dan Konseling.

c. Tujuan

Ada beberapa tujuan dari perumusan program kerja MGP yang direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Merumuskan visi dan misi MGP di wilayah Bandung Timur serta strategi pencapaiannya. Dengan dimilikinya rumusan visi dan misi MGP, maka kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas arah dan tujuan serta sasarnya.
- 2) Memberikan wawasan pengetahuan kepada guru Pembimbing tentang beberapa perubahan pola penyelenggaraan pendidikan dewasa ini dan implikasinya terhadap peran dan tugas guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah.
- 3) Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling yang mampu mendorong terwujudnya prestasi murid secara maksimal, sehingga mutu pendidikan secara keseluruhan dapat diwujudkan.
- 4) Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan informasi kepada guru Pembimbing tentang beberapa perubahan paradigmatis layanan bimbingan konseling saat ini disertai dengan pengenalan beberapa bentuk inovasi dalam layanan bimbingan konseling di sekolah.

d. Kegiatan

Ada beberapa kegiatan yang akan menunjang implementasi dari program kerja yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Melakukan kajian lapangan terhadap program kerja yang dirumuskan, mengingat program kerja yang dirumuskan mengingat program kerja belum diuji secara empiris sehingga belum diketahui efektivitasnya secara empiris. Dalam kegiatan ini dapat melibatkan guru Pembimbing di SMU yang ada di wilayah Bandung Timur dan pakar BP dengan fasilitator pengelola MGP Bandung Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan koreksi ke arah yang lebih *valid* dan relevan dari program kerja MGP yang dirumuskan.
- 2) Melakukan kajian-kajian konseptual tentang prosedur perumusan visi dan misi MGP, pola pengelolaan pendidikan di era otonomi dan desentralisasi pendidikan, dan beberapa isu aktual tentang inovasi dalam lapangan bimbingan konseling. Forum yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut, dapat diwujudkan dalam bentuk seminar, *workshop*, pelatihan, dan jenis kegiatan *inservice training* lainnya dengan melibatkan nara sumber dari kalangan akademisi (perguruan tinggi) dan pejabat struktural/fungsional dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, seperti pengawas SMU dan Kepala Dinas Pendidikan.
- 3) Diskusi rekan sejawat (antara sesama guru Pembimbing SMU) dengan fasilitator pengelola MGP Bandung Timur melalui kegiatan rutin MGP. Dalam kegiatan ini, para guru Pembimbing SMU dapat

melakukan *sharing* mengenai pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah.

e. Materi Kegiatan

Materi kegiatan MGP yang dirumuskan dalam program kerja merupakan suplemen dari program kerja MGP yang telah ada di wilayah Bandung Timur. Berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan, maka materi kegiatan dari program kerja yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan kegiatan MGP di wilayah Bandung Timur, adalah sebagai berikut.

- 1) Perumusan visi dan misi MGP, dengan materi kegiatan, sebagai berikut.
 - a) Rumusan visi dan misi MGP.
 - b) Strategi pencapaian visi dan misi MGP.
- 2) Peran dan tugas guru Pembimbing dalam pemberlakuan desentralisasi pendidikan, dengan materi kegiatan, sebagai berikut.
 - a) Beberapa perubahan penyelenggaraan pendidikan.
 - b) Konsep dasar desentralisasi pendidikan.
 - c) Implikasi desentralisasi pendidikan terhadap peran dan tugas guru Pembimbing di sekolah.
- 3) Peran dan tugas guru Pembimbing dalam meningkatkan mutu pendidikan (prestasi murid), dengan materi kegiatan sebagai berikut.

- a) Pola belajar efektif di SMU.
 - b) Pemanfaatan sumber-sumber belajar dalam meningkatkan prestasi belajar (perpustakaan sekolah, publikasi jurnal, internet, dan buku penunjang pelajaran, serta kelompok belajar).
 - c) Pemanfaatan data yang diungkap melalui angket, seperti kapan pemanfaatannya, data atau informasi apa saja yang dimanfaatkan, apa yang sebaiknya diperoleh dari angket, dan apa yang perlu dirubah dari angket.
- 4) Kerja sama kemitraan MGP dengan kalangan akademisi (PT), dengan materi kegiatan sebagai berikut.
- a) Beberapa perubahan pengelolaan dan prinsip bimbingan konseling
 - b) Beberapa tantangan dunia pendidikan dewasa ini dan implikasinya bagi peran dan tugas guru Pembimbing di sekolah.
 - c) Beberapa bentuk inovasi dalam layanan bimbingan konseling di sekolah.

f. Prosedur dan Metode

Implementasi program kerja yang dirumuskan merupakan bagian integral dari program kerja yang telah ada dalam pengelolaan MGP di Wilayah Bandung Timur. Sifat dari implementasi program kerja ini mempersyaratkan adanya kerja sama dan koordinasi antara pengelola MGP, guru Pembimbing dan kalangan akademisi atau pakar BK di

Perguruan Tinggi serta beberapa instansi terkait di bidang penyelenggaraan pendidikan. Perlunya kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, didasarkan pada pertimbangan bahwa materi kegiatan yang dirumuskan dalam program kerja MGP ini bersinggungan dengan isu aktual di bidang bimbingan konseling dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berada di luar wewenang dan pengetahuan guru Pembimbing di sekolah.

Mengingat program kerja MGP yang direkomendasikan ini masih bersifat tentatif, maka dalam pelaksanaannya diperlukan tahapan kegiatan sebagai berikut.

- 5) Melakukan pengkajian tentang tingkat feasibilitas manakala program kerja MGP ini dilaksanakan. Dalam pengkajian ini, pengelola MGP dapat menghadirkan pakar BK dari perguruan tinggi dan birokrat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.
- 6) Melaksanakan program kerja oleh pengelola MGP dengan melibatkan kalangan akademisi (pakar BK) dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaan program kerja ini, sebaiknya dibuat pedoman monitoring kegiatan sebagai instrumen untuk menilai lancarnya tidaknya implementasi program kerja.
- 7) Evaluasi kegiatan yang ditujukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program kerja dan analisis dampak terhadap peningkatan

profesionalisme guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah.

g. Sarana yang Diperlukan

Sarana yang diperlukan dalam implementasi program kerja yang direkomendasikan ini dapat memanfaatkan sarana yang ada dalam kepengurusan MGP di Wilayah Bandung Timur. Papan tulis dalam bentuk *white board* dan spidolnya, OHP, dan ruang pertemuan merupakan sarana standar yang diperlukan untuk menunjang kelancaran implementasi program kerja dimaksud.

h. Evaluasi

Untuk mengevaluasi program kerja yang dirumuskan, dapat dilakukan dalam dua kegiatan evaluasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh pengelola MGP di Wilayah Bandung Timur, yaitu evaluasi proses dan evaluasi dampak atau hasil. Evaluasi proses dapat dilaksanakan ketika berlangsungnya pelaksanaan program kerja dengan indikator keberhasilan adalah kelancaran pelaksanaannya dan antusias penyaji atau nara sumber dan anggota MGP (guru Pembimbing) dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan. Sedangkan evaluasi dampak dimaksudkan untuk menilai kontribusi yang diberikan oleh pelaksanaan program kerja ini terhadap profesional guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah.

i. Pengembangan Staf

Untuk melaksanakan program kerja ini, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari para pengelola MGP, khususnya dalam merumuskan visi dan misi MGP. Tentang hal ini, dapat saja pengelola MGP mendapatkan materi pelatihan dari pihak akademisi tentang prosedur perumusan visi dan misi, misalnya pelatihan tentang aplikasi analisis SWOT dalam merumuskan visi dan misi MGP.

Rincian tentang program kerja sebagaimana yang diuraikan di atas, dipetakan dalam bentuk matrik sebagai berikut.

Matrik Perumusan Program Kerja MGP di Wilayah Bandung Timur

No	Tujuan	Masalah	Program Kerja	Kegiatan	Pelaksana	Sasaran/ Target	Pengembangan Staf
1	<p>Merumuskan visi dan misi MGP di wilayah Bandung Timur serta strategi pencapaiannya. Dengan dimilikinya rumusan visi dan misi MGP, maka kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas arah dan tujuan serta sasarannya.</p>	<p>MGP di wilayah Bandung Timur belum memiliki rumusan visi dan misi MGP</p>	<p>Perumusan visi dan misi MGP, dengan materi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumusan visi dan misi MGP. b. Strategi pencapaian visi dan misi MGP 	<p>Pengelola MGP merumuskan visi dan misi MGP, dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi aspek-aspek internal MGP (kekuatan dan kelemahan) melalui diskusi mingguan sesama anggota MGP (guru Pembimbing) 2. Mengidentifikasi aspek-aspek eksternal MGP (peluang dan tantangan) melalui diskusi mingguan sesama anggota MGP (guru Pembimbing). 3. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan guru Pembimbing dalam upaya pengembangan kompetensi profesional melalui diskusi mingguan antara sesama anggota MGP (guru Pembimbing). 4. Merumuskan visi dan misi MGP dengan fasilitator pakar BP dari kalangan akademisi. 	<p>- Ketua MGP sebagai narasumber tentang program kerja MGP</p> <p>- Kepala Sekolah sebagai narasumber tentang arah dan kebijakan pengelolaan-pendidikan pada sekolah</p> <p>- Kalangan akademisi sebagai nara sumber tentang paradigma layanan bimbingan konseling saat ini dan kaitannya dengan visi dan misi layanan Bimbingan Konseling di Sekolah.</p>	<p>- Terumuskannya visi dan misi MGP Bandung Timur</p>	<p>- Pembinaan dan pelatihan pengelola MGP dalam merumuskan visi dan misi MGP, melalui upaya-upaya antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusi mingguan - Seminar - Workshop



				<p>Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk workshop.</p> <p>5. Mensosialisasikan rumusan visi dan misi MGP kepada guru Pembimbing, melalui kegiatan seminar dan kunjungan ke sekolah (school visit).</p>			
<p>2</p>	<p>Memberikan wawasan pengetahuan kepada guru Pembimbing tentang beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan dewasa ini dan implikasinya terhadap peran dan tugas guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah.</p>	<p>Adanya perubahan kebijakan dalam manajemen pendidikan nasional yang berimplikasi terhadap peran dan tugas Guru Pembimbing di sekolah.</p>	<p>Peran dan tugas guru Pembimbing dalam desentralisasi pendidikan, dengan materi kegiatan:</p> <p>a. Beberapa perubahan penyelenggaraan pendidikan, seperti pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.</p> <p>b. Konsep dasar desentralisasi pendidikan, meliputi hak dan wewenang kepala sekolah, guru, dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.</p>	<p>1. Mengidentifikasi beberapa produk perundang-undangan dan kebijakan baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia dewasa ini.</p> <p>2. Membahas beberapa perubahan paradigmatik pengelolaan pendidikan pada level sekolah.</p> <p>3. Membahas standar peran dan tugas guru Pembimbing di sekolah dalam kaitannya dengan implementasi perundang-undangan dan kebijakan pendidikan, misalnya otonomi daerah, Manajemen Berbasis Kompetensi, dan Kurikulum Berbasis Kompetensi.</p>	<p>- Ketua MGP sebagai narasumber tentang program kerja MGP di era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan</p> <p>- Pengawas SMU Kota Bandung, sebagai narasumber tentang tugas pokok dan fungsi guru Pembimbing dalam kerangka kebijakan desentralisasi pendidikan</p>	<p>- Dipahaminya peran dan fungsi Guru Pembimbing dalam manajemen pendidikan di era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan.</p>	<p>- Seminar atau lokakarya tentang peran dan fungsi guru Pembimbing dalam era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang diadakan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.</p>

3	Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan	1. Upaya ke arah peningkatan mutu pendidikan	Peran dan tugas guru Pembimbing dalam meningkatkan mutu	1. Membahas berbagai pendekatan atau pola belajar efektif bagi siswa	- Ketua MGP sebagai narasumber	- Dirumuskannya program bimbingan di	- Diskusi rekan sejawat tentang pola belajar efektif pada
			c. Implikasi desentralisasi pendidikan terhadap peran dan tugas guru Pembimbing di sekolah., seperti kewenangan akademis guru Pembimbing dalam merumuskan program Pembimbing berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan lingkungan kontekstual sekolah, tanpa harus secara penuh terikat oleh kurikulum BP secara nasional.		- Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai narasumber tentang kebijakan pengelolaan pendidikan jenjang SMU di Kabupaten Bandung - Pakar Manajemen Pendidikan yang membahas tentang manajemen pendidikan di level sekolah dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan		

<p>bagi guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling yang mampu mendorong terwujudnya prestasi murid secara maksimal, sehingga mutu pendidikan secara keseluruhan dapat diwujudkan.</p>	<p>di sekolah merupakan isu sentral yang menjadi target setiap sekolah.</p> <p>2. Adanya sebagian persepsi terhadap peran dan tugas guru Pembimbing yang kurang maksimal dalam mendorong mutu pendidikan pada level sekolah.</p>	<p>pendidikan (prestasi murid), dengan materi kegiatan:</p> <p>1. Pola belajar efektif di SMU, seperti cara belajar di sekolah dan rumah, persiapan dalam menghadapi ulangan, dan inormasi studi di Perguruan Tinggi.</p> <p>2. Pemanfaatan sumber-sumber belajar dalam meningkatkan prestasi belajar (perpustakaan sekolah, publikasi jurnal, internet, dan buku penunjang pelajaran, serta kelompok belajar).</p> <p>3. Pemanfaatan data yang diungkap melalui angket, seperti kapan pemanfaatannya, data atau informasi apa saja yang dimanfaatkan, apa yang sebaiknya diperoleh dari angket, dan apa yang perlu dirubah dari angket.</p>	<p>di SMU.</p> <p>2. Mengidentifikasi berbagai sumber belajar di sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi murid.</p> <p>3. Pembicara dapat menghadirkan guru-guru Pembimbing dan guru mata pelajaran yang pernah mengikuti penataran/seminar, baik di bidang BP maupun mata pelajaran</p>	<p>tentang program kerja MGP</p> <p>- Kepala Sekolah sebagai narasumber tentang program kerja sekolah di bidang akademis dan pengelolaan siswa.</p> <p>- Pengawas Sekolah sebagai narasumber tentang pola pembelajaran di jenjang SMU</p> <p>- Guru Pembimbing sebagai praktisi yang menginformasikan berbagai layanan bimbingan akademis bagi siswa SMU.</p> <p>- Pakar BP sebagai narasumber</p>	<p>sekolah yang dapat mendorong terwujudnya mutu pendidikan (prestasi siswa)</p>	<p>siswa SMU melalui kegiatan diskusi mingguan</p> <p>- Seminar atau lokakarya tentang karakteristik belajar siswa SMU dan upaya pengembangannya, paling sedikit satu kali dalam satu tahun.</p>
---	--	--	---	--	--	--

<p>4</p> <p>Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan informasi kepada guru Pembimbing tentang beberapa perubahan paradigmatik layanan bimbingan konseling saat ini disertai dengan pengenalan beberapa bentuk inovasi dalam layanan bimbingan konseling di sekolah.</p>	<p>1. Banyak isu-isu aktual dan inovasi di bidang layanan bimbingan konseling yang dikemukakan para pakar Bimbingan Konseling di Perguruan Tinggi belum terakses oleh guru-guru Pembimbing di sekolah.</p> <p>2. Kinerja guru Pembimbing di sekolah pada umumnya tergantung pada juklak dan juknis secara nasional, dan belum mencerminkan upaya inovatif dalam</p>	<p>Kerjasama kemitraan MGP dengan kalangan akademisi (PT), dengan materi kegiatan:</p> <p>a. Beberapa perubahan paradigma atau prinsip bimbingan konseling</p> <p>b. Beberapa tantangan dunia pendidikan dewasa ini dan implikasinya bagi peran dan tugas guru Pembimbing di sekolah.</p> <p>c. Beberapa bentuk inovasi dalam layanan bimbingan konseling di sekolah.</p>	<p>1. Membahas berbagai isu aktual dan inovasi di bidang layanan bimbingan konseling dewasa ini, seperti model bimbingan komprehensif, ekologis, dan perkembangan, serta bimbingan konseling melalui pendekatan agama (islan) dan lintas budaya (multicultural counseling).</p> <p>2. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi siswa saat ini dan implikasinya terhadap upaya inovasi guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah, seperti tawuran, peredaran narkotika di kalangan pelajar SMU,</p>	<p>tentang perencanaan karir studi siswa SMU dan model bimbingan akademis yang relevan bagi siswa SMU.</p>	<p>- Dirumuskan dan dilaksanakan berbagai program inovasi di bidang layanan bimbingan konseling di sekolah</p>	<p>- Seminar atau lokakarya tentang berbagai bentuk inovasi di bidang layanan bimbingan konseling, dengan menghadirkan pakar BP, yang diselenggarakan dengan menggunakan even seperti hari pendidikan nasional atau menjelang tahun ajaran baru.</p>
--	---	---	---	--	--	--

